

KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PENURUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

INCOME INEQUALITY AND DECREASE OF WELFARE SOCIETY

M.Syawie

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
Email: msyawie@yahoo.com

Diterima: 23 April 2013, Disetujui: 29 Juli 2013

Abstrak

Artikel ini akan membahas perihal ketimpangan pendapatan dan relevansinya dengan kecenderungan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Meski kinerja ekonomi paska krisis cenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi sosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia. Memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan semakin parahnya kemiskinan. Berbagai pihak mengkaitkan ketimpangan dengan pola pembangunan yang tak berpihak kepada kelompok miskin. Persoalan yang perlu dipertimbangkan yang terkait dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat dapat dikemukakan di sini, yaitu relevansi pendidikan yang membuat anggota masyarakat lebih kapabel dan sesuai dengan kebutuhan lokal, arah investasi kepada penguatan ekonomi rakyat.

Kata Kunci: ketimpangan pendapatan dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Abstract

This article discussed about the income inequality which are description inclining and declining relevance to the community. Despite the post-crisis economic performance tends to improve, inequality and poverty indicators show evidence of socio-economic exclusion of the majority of Indonesian society. Worsening equality in line with statistics showing an increasing tendency severity of poverty. Inequality relating the various parties to the pattern of development that is not in favor of the poor. The question that needs to be considered related to the improvement of people's well being can be submitted here, that the relevance of education to make the community have more capable and suitable to the local needs, towards investment into strengthening of the economy people.

Keywords: inequality of income and decrease in social welfare.

PENDAHULUAN

Teori Gunnar Myrdal menekankan proses divergen yang menyebabkan ketimpangan makin melebar. Fenomena ini dijelaskan Myrdal sebagai akibat dari proses penyebab akumulatif (*cumulative causation/CC*). Myrdal (1957), sebagaimana dikutip Kuncoro (2013), menyebut adanya dampak kurang menguntungkan untuk menjelaskan fenomena meningkatnya ketimpangan antara

negara maju dan negara berkembang. Ia berpendapat, *backwash effect* lebih besar daripada dampak penyebaran. Dampak penyebaran adalah dampak dari ekspansi di pusat kegiatan ekonomi di daerah yang relatif tertinggal melalui kenaikan permintaan produk pertanian (misalnya bahan pangan), bahan baku, serta barang konsumsi yang dihasilkan industri kecil. Inilah yang minim terjadi di Indonesia karena: 1) produk pertanian dan industri masih

banyak yang diimpor dari luar; 2) lemahnya keterkaitan antara usaha besar dan kecil (Kuncoro, 2013).

Teori Myrdal tentang *cumulative causation* tak menyangkal adanya kemungkinan proses kovergen akibat dampak penyebaran. Penyebabnya adalah faktor-faktor “non ekonomi” atau kelembagaan. Karena itu, analisis proses pembangunan yang hanya menekankan faktor ekonomi menjadi kurang relevan karena faktor kelembagaan, historis, sosial, dan kultural juga berperan. Meski kinerja ekonomi pasca krisis cenderung membaik, indikator ketimpangan dan kemiskinan menunjukkan bukti adanya eksklusi sosial-ekonomi bagi kebanyakan manusia Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian Indonesia boleh dikatakan sangat impresif. Prestasi ini terasa istimewa karena berhasil dicapai ketika perekonomian dunia tengah meredup akibat krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Di Asia, perekonomian Indonesia juga lebih menonjol dibandingkan *emerging countries* lainnya seperti China dan India. Meskipun tidak mencapai pertumbuhan setinggi keduanya, perekonomian Indonesia merupakan yang paling stabil di dunia (Warta Ekonomi, 2013). Namun, di balik angka pertumbuhan yang tinggi itu, terdapat masalah yang kian mencuat. berkat pertumbuhan yang mencapai rata-rata 6 persen per tahun, angka kemiskinan di Indonesia memang terus menurun. Begitu pula dengan angka pengangguran terbuka, menurut data terakhir Badan Pusat Statistik sebesar 7,7 juta orang – bandingkan dengan sepuluh tahun lalu yang mencapai 12 juta orang. Selain itu, pendapatan perkapita Indonesia juga naik, mencapai US\$3.600. Kendati demikian, koeôsien gini Indonesia malah makin buruk.

Penyakit ekonomi serius yang dihadapi Indonesia adalah ketimpangan yang meningkat cukup tinggi selama sepuluh tahun terakhir,

tercermin dari angka terakhir Rasio Gini 0,41. Sejumlah analis mengatakan, angka ketimpangan dalam kenyataannya lebih tinggi lagi karena indikator pengeluaran bias dan tak sensitif terhadap pengeluaran nyata kelompok masyarakat menengah ke atas. Memburuknya ketimpangan sejalan dengan statistik yang menunjukkan kecenderungan peningkatan keparahan kemiskinan (Ganie-Rochman, 2013, h. 6). Berbagai pihak mengaitkan ketimpangan dengan pola pembangunan yang tak berpihak ke kelompok miskin.

PEMBAHASAN

Persoalan Ketimpangan

Ekonomi Indonesia dihadapkan pada ketidakseimbangan yang dapat berakibat pada terganggunya stabilitas ekonomi, dan dalam keadaan yang memburuk dapat menjadi pemicu krisis. Ketidakseimbangan tersebut diantaranya adalah ketidakseimbangan yang bersifat struktural dalam distribusi pendapatan sebagaimana ditunjukkan oleh relatif tingginya Koefesien gini sebesar 0,41 (angka 1 menunjukkan ketimpangan mutlak). Tentu saja terdapat ketidakseimbangan lain yang berkaitan dengan pendapatan ini, seperti ketimpangan regional antara kawasan barat dan timur (Juoro, 2013). Ketidakseimbangan tersebut memberikan sinyal negatif kepada pelaku ekonomi dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas ekonomi, seperti menekan nilai rupiah. Khususnya untuk ketimpangan yang relatif tinggi, hal ini akan memolarisasi masyarakat yang berakibat pada meningkatnya hambatan struktural bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut pandangan Juoro, pengalaman di banyak negara berkembang menunjukkan, ketimpangan yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kemudian terjerambab dalam krisis yang dalam. Bukan saja ekonomi, melainkan juga

sosial-politik. Perekonomian yang berhasil menjadi maju pada umumnya ketimpangan pendapatannya relatif rendah, yang berarti perkembangan ekonomi melibatkan peran serta luas masyarakat.

Menurut Ganie-Rochman (2013), ada tiga perspektif dalam melihat ketimpangan. Pertama, semata sebagai gambaran distribusi hasil pembangunan. Dari angka ketimpangan terlihat berapa persen penduduk dalam strata pendapatan atas, menengah, dan rendah menguasai aset dalam pembangunan. Perspektif ini baru memberi gambaran persentase, karena arti dan akibat ketimpangan dalam konteks suatu negara belum terlihat. Bisa saja angka ketimpangan tinggi terjadi di negara berpendapatan nasional cukup tinggi dengan angka orang miskin kecil, seperti terjadi di negara industri maju sebelum krisis. Jika ada isu moral yang muncul adalah keadilan. Pada tingkat kebijakan, angka ketimpangan biasanya digunakan untuk menilai persebaran pajak dan subsidi. Di Indonesia, contohnya, subsidi BBM yang diletakkan dalam tarik menarik antara efisiensi dan dampak ke golongan bawah

Kedua, melihat ketimpangan dalam konteks kaitan antara sektor dengan tingkat pertumbuhan tinggi atau sektor yang menjadi basis ekonomi kelas menengah atas dengan kegiatan ekonomi rakyat lemah. Perspektif ini lebih kompleks karena sudah menganalisis sektor ekonomi yang ada dalam masyarakat. Isu moralnya, seberapa jauh “kelas atas” mendapat kemudahan dalam kebijakan pemerintah; atau, seberapa jauh sektor “atas” meneteskan pertumbuhan ke sektor rakyat.

Menurut Ganie Rochman (2013), di Indonesia perspektif ini berguna untuk melihat untung rugi mempunyai basis ekonomi berdasarkan ekstraksi SDA. Ekspor Indonesia masih bergantung komoditas SDA

yang 65,2 persen dari total ekspor. Sektor ini mencerminkan ketimpangan karena bersifat rantai pendek, artinya tak banyak sektor lain yang digerakkan olehnya. Penyerapan tenaga kerja terbatas karena sifatnya terstruktur ketat dan dijual ke luar negeri dengan pengolahan minim

Ketiga, melihat ketimpangan dari karakter pelayanan publik. Ketimpangan muncul karena pelayanan publik yang buruk bagi kalangan bawah seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, dan akses kredit. Ini membuat mereka tak bisa bersaing dan meningkatkan taraf hidup. Perspektif ini memberi kemungkinan analisis lebih luas seperti ketimpangan sosial. Misalnya, tingkat pendidikan dan pengetahuan kalangan bawah menghambat mereka masuk ke institusi keuangan modern (baca: Ganie Rochman, 2013). Perspektif ini memberi kemungkinan melihat masalah pelayanan publik bukan hanya persoalan pengadaan, melainkan kesesuaian dan kualitas. Sekolah seperti apakah yang disediakan bagi golongan miskin? Apakah sesuai kebutuhan untuk menghadapi tantangan hidup mereka? Apakah sekolah keterampilan sebagai alternatif sekolah umum sudah tersedia dan relevan dengan kebutuhan. Puskesmas cenderung tak mampu jadi pusat kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan agar rakyat miskin jauh dari penyakit.

Perspektif Mudrajad Kuncoro (2013), mengungkapkan bahwa dalam studi empiris ada dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini dan berapa kue nasional yang dinikmati 40 persen golongan pendapatan terendah. Ketimpangan yang meningkat diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar sebagaimana tercermin dari rasio gini yang

meningkat dari 0,33 (2002) ke 0,41 (2011). Ironisnya, penurunan kue nasional yang dinikmati kelompok 40 persen penduduk termiskin justru diikuti kenaikan kue nasional yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya dari 42,2 persen (2002) menjadi 48,42 persen (2011). Sementara kelompok 40 persen penduduk menengah mengalami penurunan kue nasional dari 36,9 persen (2002) menjadi 34,7 persen (2011). Ternyata ada indikasi kuat terjadi *trickle-up effect*, efek “muncrat” ke atas, dalam proses pembangunan kita.

Jenis kedua, menurut Kuncoro, ketimpangan antar daerah penting untuk diteliti karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama lebih dari lima dasawarsa terakhir. Betapa tidak, data BPS hingga triwulan IV 2012 menunjukkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57,5 persen, diikuti Pulau Sumatera sekitar 23,9 persen. Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya kebagian sisanya, sekitar 18,6 persen. Dengan kata lain, ketimpangan antar wilayah dan pulau terus terjadi.

Nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia versi Badan Pusat Statistik sampai triwulan III-2011 sudah mencapai Rp 5.472,9 triliun atau rata-rata per triwulan Rp 1.824 triliun. Jadi, total PDB hingga akhir tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp 7.396,5 triliun (Kompas, 26/11/2011). Di sisi PDB yakni nilai barang dan jasa yang diproduksi warga dari suatu negara selama periode satu tahun. Dalam memproduksi ini, warga negara tadi bisa saja menggunakan faktor-faktor produksi yang berada di negara lain. Para tenaga kerja Indonesia di luar negeri masuk dalam hitungan terakhir ini (Kompas, 26/11/2011).

Intinya, total PDB sebanyak Rp 7.369,5 triliun tadi merupakan hasil kerja keras seluruh warga negara Indonesia di mana saja berada. Jika hasil kerja keras tadi dibagikan kepada sekitar 240 juta penduduk, maka masing-masing penduduk mendapat Rp 30,8 juta. Persoalannya, apakah pendapatan Rp 30,8 juta ini merata untuk setiap penduduk?

Majalah Forbes, yang dikutip Pieter P Gero (Kompas, 26/11/2011) secara tak langsung memberikan jawaban “tidak merata” atas pertanyaan di atas. Forbes mengungkapkan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Total kekayaan mereka mencapai 84,82 miliar dollar AS atau setara dengan 761,7 triliun (kurs Rp 9.000 per dollar AS). Di posisi orang terkaya di Indonesia ditempati dua bersaudara, R Budi dan Michael Hartono, pemilik pabrik rokok Djarum dan Bank Central Asia (BCA) dengan kekayaan bersih 14 miliar dollar AS atau setara Rp 126 triliun. Menyusul Susilo Wonowidjojo, pemilik pabrik rokok Gudang Garam dengan kekayaan 10,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 94,5 triliun. Lepas dari akurasi data yang disampaikan Forbes, sangat jelas bahwa 40 orang kaya Indonesia ini menguasai sekitar 10 persen dari PDB negara ini. Entah berapa besar pendapatan mereka pertahun. Dengan kekayaan mencapai Rp 126 triliun, secara pendapatan mencapai Rp 345 miliar per hari. Sementara sebagian besar dari warga harus berbagi pendapatan atas 90 persen dari PDB yang tersisa. Jika pendapatan per kapita Rp 30,8 juta, berarti sebagian besar berpenghasilan Rp 85.000 per hari. Dalam kenyataan, masih ada warga berpenghasilan kurang dari satu dollar AS atau Rp 9.000 per hari (Kompas, 26/11/2011). Pesan yang ada, semoga para warga kaya Indonesia ini menjadi pembayar pajak yang taat. Jangan berkongkalikong dengan aparat untuk menghindari pajak. Juga tak lupa melakukan tanggung jawab sosial

perusahaan. Biar anugerah kekayaan tadi bisa ikut dirasakan oleh warga negara lainnya.

Dikabarkan juga (Kompas, 8/11/2011), bahwa jumlah rekening dan simpanan nasabah kelas “kakap” dengan nilai di atas Rp 500 juta meningkat selama sebulan terakhir. Data Lembaga Penjamin simpanan menunjukkan, per September 2011 simpanan di atas Rp 500 juta mencapai Rp 1.750,97 triliun yang terdiri dari 591.980 rekening. Data simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dikutip Kompas, Senin (7/11), itu meliputi dana pihak ketiga dan simpanan antarbank. Adapun per Agustus 2011, simpanan di atas Rp 500 juta sebesar Rp 1.654 triliun yang terdiri atas 577.600 rekening. Data itu menunjukkan, secara umum, total simpanan bulan September 2011 sebesar Rp 2.586 triliun, naik dari Agustus 2011 yang sebesar Rp 2.492 triliun. Namun, jumlah rekening berkurang dari 100,162 juta rekening pada Agustus 2011 menjadi 99,929 juta rekening pada September 2011.

Bank umumnya menempatkan nasabah dengan simpanan di atas Rp 500 juta pada kategori premium meskipun ada juga bank yang mengelompokkan nasabah utamanya setelah simpanan mencapai Rp 1 miliar. Simpanan tersebut bisa berupa dana murah, seperti tabungan atau giro dan dana mahal seperti deposito. LPS menyertakan juga simpanan berupa sertifikat deposito dan simpanan lainnya. Simpanan nasabah kelas kakap di atas Rp 500 juta didominasi deposito, yang mencapai Rp 970,032 triliun. Untuk simpanan di atas Rp 500 juta yang berupa tabungan sebesar Rp 253,405 triliun dan berupa giro sebesar Rp 513,59 triliun (Kompas, 8/11/2011).

Sampai dengan tahun 2011, populasi penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin berpenghasilan

Rp 233.740 per bulan berjumlah 31,2 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 30,2 juta jiwa. Selanjutnya BPS juga mencatat penduduk yang hampir miskin (berpenghasilan di atas Rp 233,740 – Rp 250.000 per bulan) berjumlah 70 juta jiwa (BPS, 2011 dalam Suradi 2012). Kemudian Kemensos pada tahun 2011 mencatat, bahwa dari jumlah penduduk miskin tersebut terdapat fakir miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan jumlahnya 7,6 juta jiwa (Suradi, 2012). Dari jumlah fakir miskin tersebut yang menempati rumah tidak layak huni berjumlah 4,6 juta jiwa (Pusdatin Kesos, 2011).

Pada 1976, jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 44,2 juta orang atau 81,5 persen dari total penduduk miskin. Lebih dari 37 tahun kemudian, angka ini hanya mengalami sedikit perbaikan. Per September 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 28,594 juta (11,66 persen). Dari jumlah itu, 63 persen berada di pedesaan. Data ini menunjukkan, puluhan tahun pembangunan ekonomi ternyata kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa. Selain itu, dengan garis kemiskinan hanya Rp 259.520 per bulan atau Rp 8.650 per hari per orang, kita bisa mempertanyakan seperti apa kualitas hidup yang dijalani para warga miskin itu (Khudori, 2013).

Inflasi yang tinggi dan pendapatan yang rendah membuat warga miskin terpukul dua kali. Apalagi menurut BPS, mayoritas pengeluaran penduduk masih untuk pangan. Rata-rata pengeluaran penduduk untuk pangan mencapai 49,89 persen pada 2012. Bahkan, bagi penduduk miskin, 73,5 persen pengeluaran keluarga untuk pangan. Sedikit saja lonjakan harga, daya beli mereka anjlok drastis. Itulah sebabnya, banyak ekonom menyebut inflasi sebagai “perampok uang rakyat” (Khudori, 2013). Kondisi semacam ini bukan khas Indonesia. Hampir di

negara-negara berkembang pangsa pengeluaran pangan keluarga memang masih dominan. Ketika harga kebutuhan pokok naik, angka warga miskin pun melonjak. Pengendalian in¹/₄asi menjadi kebutuhan mutlak. Bagi warga miskin, in¹/₄asi yang terkendali akan menjadi benteng pertahanan hidup. Bagi pemerintah, in¹/₄asi yang terjaga akan mengamankan indikator ekonomi lainnya.

Haris Munandar (2013), menyebutkan in¹/₄asi yang berpotensi tinggi tahun ini di satu sisi layak dicermati. Namun, di sisi lain, banyak kalangan masyarakat berpendapat in¹/₄asi benar-benar abstrak. Muncul banyak pertanyaan di kalangan awam, apa benar in¹/₄asi berdampak buruk kepada orang kebanyakan, terutama yang masuk kategori miskin? Munandar mengisahkan, empat puluh tahun lalu, seorang bapak dengan satu hektar sawah padi bisa menghidupi keluarga dengan lima anak. Hasil sawah itu bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya, setidaknya sampai lulus SMA, bahkan perguruan tinggi. Namun, hari ini satu hektar sawah dengan dua kali panen setahun yang masing-masing menghasilkan tujuh ton gabah, menghidupi lima anak sepertinya persoalan besar. Nominal hasil panen yang didapat hari ini rata-rata Rp 3 juta-Rp 5 juta per ton sehingga hasil yang didapat Rp 21 juta – Rp 35 juta sebelum dikurangi beragam biaya dan utang tanam per panen.

Ilustrasi itu adalah gambaran tentang apa itu in¹/₄asi. Nilai produk barang yang sama menghasilkan kemampuan beli yang menurun pada waktu berikutnya. Sementara bagi pekerja, gambarannya: penghasilannya sama, tetapi barang yang didapat berkurang dari waktu ke waktu. Bisa jadi hal itu karena harga barang-barang yang terus naik atau daya beli mata uang yang menurun terhadap barang yang sama. Sepintas mungkin sulit membayangkan bagaimana in¹/₄asi mempengaruhi kemiskinan,

atau paling tidak bagaimana in¹/₄asi dan kemiskinan berhubungan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi (Nainggolan, dkk, 2012) menyimpulkan bahwa secara umum Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak positif bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM). Ada perbedaan signifikan antara kondisi RTSM sebelum PKH dan sesudah PKH dalam indikator-indikator partisipasi bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Kondisi PKH lebih baik daripada kondisi sebelum PKH. Namun demikian, PKH belum berdampak positif terhadap status sosial ekonomi RTSM.

Dalam Naskah Kebijakan Kesejahteraan Sosial (2012) tentang Perlindungan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui PKH Di Indonesia, terungkap juga bahwa pelaksanaan PKH belum cukup sempurna, ditemukan sejumlah kendala, seperti: perluasan cakupan peserta program yang lambat, model dan hasil pendataan calon peserta masih dikeluhkan sebagian masyarakat, program kurang memberi ruang bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi, unit sasaran peserta belum sesuai konsep program, PKH berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam keluarga, dan tugas pendampingan terlalu didominasi tugas prosedur administrasi.

Penelitian tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan, Studi Evaluasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Perkotaan (Suradi, dkk, 2012), mengungkapkan bahwa dari hasil analisis kebijakan diperoleh informasi bahwa implementasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) belum mencapai tujuan secara optimal, meskipun pada variabel yang diukur, yaitu pemenuhan

kebutuhan rumah, kondisi sosial dan psikologis semuanya menunjukkan kecenderungan meningkat dari kondisi semula.

Masalah ketimpangan ini dalam praktik-cenderung sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah seharusnya memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak kepada rakyat. Namun, yang terjadi sebaliknya, kesenjangan terjadi di mana-mana. Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinas mengendarai mobil mewah dan tinggal di perumahan mewah (Kuncoro, 2013). Tak ketinggalan, para kontraktor sebagai mitra kerja pemda juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi alam secara besar-besaran di daerah, masyarakat di sekitarnya hanya bisa menjadi penonton sehingga mendorong munculnya kecemburuan sosial, kesenjangan, dan berujung pada tindak kekerasan.

Gambaran kemajuan ekonomi Indonesia yang diperlihatkan melalui angka pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 6 persen juga layak dipertanyakan jika melihat tingkat upah buruh yang masih sangat tidak memadai. Sepanjang tahun 2012 hingga sekarang, gejala buruh menuntut upah menjadi bukti bahwa angka pertumbuhan ekonomi tak punya arti signifikan. Ironisnya, angka pertumbuhan ekonomi ini berbanding lurus dengan perluasan laju deforestasi, eksploitasi sumber daya alam dan mineral yang mengakibatkan konflik antara korporasi dan rakyat (Wahyu Susilo, 2013). Dalam perspektif gender, kesenjangan juga masih terlihat dan makin membuat perempuan terdiskriminasi. Di bidang pendidikan, walau laporan MDGs Indonesia memperlihatkan

keberhasilan akses pendidikan bagi perempuan di tingkat dasar. Akses perempuan pada pendidikan makin rendah pada tingkat pendidikan menengah ke atas.

Problematika Penurunan Kesejahteraan

Ada dua aliran teori besar berkembang membangun ekonomi mensejahterakan masyarakat. Pertama adalah aliran konservatif yang mendambakan kebebasan pasar dari intervensi pemerintah. Aliran konservatif ini percaya semangat "*homo-economicus*" selaku "makhluk ekonomi" bisa mengembangkan kemampuan diri asalkan diberi kebebasan berkarya dan mencipta (Emil Salim, 2012). Landasan ilmu aliran ini dikembangkan oleh "*Chicago School*" Amerika Serikat dengan pemikiran (bukan pemikir?) utamanya Profesor Millton Friedman. Dalam pola pembangunan ini kemiskinan akan terhalau oleh daya kreatif masyarakat yang tumbuh dalam kebebasan ekonomi mengikuti nalurinya selaku "makhluk ekonomi".

Kedua mengembangkan teori intervensi pemerintah dalam pasar menggiring pembangunan ekonomi ke sasaran tertentu, seperti kesempatan kerja penuh, "*counter-cycilus*", *counter-inflasi*. Landasan teorinya diletakkan oleh John Meynard Keynes dari Universitas Cambridge, Inggris. Perinsipnya bahwa "pasar" tidak bisa dibiarkan mandiri, tapi perlu peranan pemerintah untuk memberantas kemiskinan dengan intervensi dalam ekonomi. Maka, pemerintahlah harus aktif "mengangkat sang miskin" keluar dari lubang kemiskinan melalui kebijakan fiskal dan moneter yang "*pro-poor*". (Emil Salim, 2012). Penganut paham ini, seperti Prof. Joseph Eugene Stiglitz, Jeffrey Sachs, dan di Tanah Air kita Prof. Sumitro Djojohadikusumo, dan Widjojo Nitisastro, telah memperluas teori ini ke dalam langkah kebijakan pembangunan.

Banyak negara berkembang menganut aliran kedua ini. Tetapi, pembangunan memberantas kemiskinan tidak bisa dilaksanakan dengan sekali pukul dalam waktu singkat. Pembangunan itu sendiri, berkat Prof. W.W. Rostow dalam buku klasiknya “The Stages of Economic Growth”, sebagaimana dikutip Emil Salim (2012), berlangsung secara bertahap. Mula-mula berupa ekonomi “pertanian” didominasi kerja manusia dengan sumber daya alam terbarukan untuk kemudian beralih ke tahap berikut “industri”, berisikan tenaga kerja dengan modal dan mesin. Kemudian tumbuh tahap ketiga, ekonomi jasa yang mengandalkan kreativitas dan kemampuan *skills* manusia.

Rostow berhasil menjelaskan tahapan pembangunan yang mengubah institusi kegiatan ekonomi, tetapi tidak berhasil menjelaskan bagaimana dalam pentahapan ini menghapus kemiskinan, kemelaratan, dan ketertinggalan *wong cilik* yang terperangkap dalam lubang kemiskinan. Pembangunan tidak selalu berujung pada pengentasan kemiskinan. Dilema yang dihadapi disini bahwa “teori tahapan pembangunan ekonomi Rostow” tidak dibarengi dengan “teori tahapan pembangunan politik” yang perlu menyertainya. Sistem politik demokrasi pada tahap ekonomi-pertanian berbeda dengan sistem politik demokrasi pada tahap ekonomi-industri. Namun, apa dan bagaimana perbedaan sistem politik yang mengiringi proses pentahapan pembangunan ekonomi tidak dijelaskan (baca: Salim, 2012). Dan, hingga kini belum berkembang teori “*Stages of Economic and Political Growth*”. Akibatnya adalah lahir situasi semrawut dalam tata kelola pembangunan ekonomi yang mengalami perubahan, tetapi tidak disertai perubahan tata kelola politik mendukung perubahan ekonomi ini. Dan, arah membangun tata kelola ekonomi memberantas kemiskinan yang tidak ditopang oleh tata kelola politik yang sehaluan, tidak

dapat menghasilkan pembangunan ekonomi memberantas kemiskinan.

Aris Ananta, peneliti di *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS) Singapura sebagaimana dikutip Meuthia Ganie Rochman (2011), membahas masalah yang sepertinya dikesampingkan sejak reformasi, yaitu masalah indikator pembangunan. Aris Ananta sekaligus juga memperkenalkan kecenderungan yang sudah terjadi di tingkat internasional untuk tidak lagi semata berpegang pada indikator pertumbuhan GDP, *gross domestic product*. Sudah banyak dibahas bahwa indikator ini memiliki kegunaan yang terbatas. Beberapa keterbatasan dari penggunaan GDP adalah tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi dari berbagai sektor yang ada di suatu negara. Keadaan ini agak bisa diatasi dengan pengukuran per sektor, tetapi dengan cacatan kemampuan instrumen dan institusional badan statistik cukup baik untuk mengukur kondisi riil (Ganie Rochman, 2011).

GNP juga selama ini dilengkapi dengan indeks pembangunan manusia (IPM, *human development index/HDI*) untuk memahami seberapa jauh pertumbuhan ekonomi, juga mencerminkan tingkat kesehatan dan pendidikan. IPM bisa digunakan untuk melihat secara sebagian tingkat ketimpangan yang terjadi pada suatu Negara meskipun juga penuh keterbatasan untuk digunakan dalam tujuan ini. Instrumen ini tidak dapat digunakan untuk memahami, misalnya pendidikan macam apa yang diperlukan untuk memperluas tingkat kesejahteraan yang dirasakan lebih banyak penduduk. Namun, upaya perbaikan indikator pembangunan bukan semata soal instrumen. Kerangka pemikiran dari tujuan pengukuran itu sendiri yang berubah. Perubahan mendasar terjadi baik pada penambahan dimensi yang diukur pada suatu masa atau ada yang sudah mengarah pada pengukuran seberapa baik masa depan kesejahteraan suatu bangsa

(Ganie-Rochman, 2011). Penambahan dimensi kesejahteraan bertujuan mengukur kesejahteraan warga suatu negara, seperti rasa aman dan ketenangan sebagai warga negara. Indikator *gross national happiness*, misalnya yang dikembangkan di Butan, mengukur keberhasilan pembangunan dari tingkat keberlanjutan ekonomi, tata kelola yang baik, pengembangan kultur, dan pelestarian lingkungan.

Upaya yang lebih komprehensif dilakukan oleh sebuah komisi yang didirikan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, di mana di dalamnya terlibat lima pemenang Hadiah Nobel Bidang Ekonomi yaitu; Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Kenneth Arrow, James Heckman, dan Daniel Kahneman. Mereka yang mempromosikan suatu indikator pembangunan barat (Ganie Rochman, 2011). Indikator yang mereka ajukan bersifat multidimensional, meliputi kesehatan, pendidikan, kegiatan personal, termasuk pekerjaan, kesempatan bersuara secara politik dan tata kelola, hubungan dan jaringan sosial, kondisi lingkungan sekarang dan ke depan, serta tingkat kepastian ekonomi dan sik. Penting untuk memahami kerangka berpikir dalam menggunakan dimensi di atas. Pertama, dimensi obyektif dan subyektif sama-sama penting. Ini berimplikasi pada metodologi pengumpulan data statistik, misalnya kecenderungan akan diukur pada tingkat individu rumah tangga. Kedua, dalam mengukur kualitas hidup harus dapat mengukur tingkat ketimpangan, misalnya dari segi kelas sosial ekonomi dan gender. Implikasi metodologisnya, biro statistik harus mendapat informasi yang dibutuhkan untuk mengagregasikan dimensi-dimensi kualitas hidup yang memungkinkan berbagai konstruksi analisis. Implikasi lain, dibutuhkan fokus pada konsumsi rumah tangga. Ketiga, berkaitan dengan yang kedua, yang diukur hanya suatu keadaan dari kelompok masyarakat tertentu, melainkan juga kapabilitas untuk membuat pilihan lain.

Semua indikator ini mempunyai latar belakang pemikiran yang luas dan mendalam. Sebagai contoh, kemampuan membuat pilihan terkait dengan penghormatan kemanusiaan untuk mengejar tujuan hidup berdasarkan keyakinannya yang baik. Apakah mereka dapat mencapai tujuan yang mereka anggap bernilai tinggi atau harus terus menerus mengompromikan nilai tersebut, entah karena kemiskinan, eksklusivitas, kekerasan, atau dominasi budaya kelompok lain. Indikator nansial tetap digunakan, tetapi dengan kerangka yang berbeda. Analisis tentang investasi misalnya, akan dilihat dari seberapa besar diberikan pada bidang yang memperkuat keberlanjutan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pengetahuan masyarakat (Ganie Rochman, 2011).

KESIMPULAN

Perspektif Meuthia Ganie berpendapat bahwa cara terbaik memahami ketimpangan agar dapat mengambil kebijakan tepat adalah menggunakan ketiga perspektif. Perspektif pertama sebagai dasar informasi, perspektif kedua untuk memahami struktur ekonomi, dan perspektif ketiga untuk mengetahui aspek institusional dalam pembangunan. Bahkan OECD dalam pertemuan tahun lalu masih mengingatkan bekerjanya faktor institusional dalam mengatasi ketimpangan bisa dilakukan sejalan kebijakan pembangunan ekonomi seperti program pelatihan kontekstual dengan menggunakan dana pendidikan yang besar itu. Pemerintah juga bisa memperbaiki institusi pasar bagi ekonomi rakyat, dan ini jauh lebih baik dibanding skema pemberian kredit selama ini.

Kemudian bagaimana Indonesia memperbaiki indikator pembangunannya. Upaya yang dilakukan di tingkat internasional baik untuk dipertimbangkan. Namun, menurut Ganie Rochman (2011), dalam memilih tentu

ada banyak pertimbangan, antara lain kapasitas institusional badan statistik dan kondisi sosial ekonomi yang ingin diperbaiki. Beberapa persoalan nasional yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan indikator pembangunan dapat disebutkan di sini, yaitu relevansi pendidikan, arah investasi ke arah penguatan ekonomi rakyat, dan arah kegiatan ekonomi berdasarkan eksploitasi sumber alam. Kita ambil contoh masalah pendidikan. Pendidikan nasional jauh dari pemikiran membuatnya sebagai instrumen pembangunan dan tujuan social, seperti keadilan dan pemerataan. Sejauh ini data statistik dan analisis yang diberikan terutama soal persebaran tingkat pendidikan, baik sekolah umum maupun kejuruan. Data semacam ini bisa mengaburkan pemahaman tentang kondisi pembangunan yang substansial. Misalnya, tanpa mengetahui macam pendidikan apa yang ada saat ini, seberapa jauh untuk membuat anggota masyarakat lebih kapabel, dan apakah sesuai dengan kebutuhan lokal data pendidikan tidak bertindak sebagai indikator yang memberi pengetahuan ke arah mana pembangunan sebenarnya sedang terjadi. Untuk bisa menghasilkan pemahaman yang berguna, misalnya, data pendidikan harus meliputi apakah tingkat dan bidang pendidikan tertentu berkaitan dengan kesempatan ekonomi, yang datanya diukur pada tingkat rumah tangga atau dikaitkan dengan data statistik potensi ekonomi daerah (Ganie, 2011). Tentu saja analisa tentang pendidikan bukan hanya tugas badan statistik. Perguruan tinggi juga harus membuat analisa kualitatif tentang jenis pendidikan mana yang sesuai dengan konteks local dan memperkuat kecenderungan lokal ke arah kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Puslitbangkessos Kementerian Sosial RI. (2012). *Naskah Kebijakan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Penulis.
- Salim, Emil. (2012). Berdayakan Wong Cilik Marhaen. dalam *An Indonesian Renaissance Kebangkitan Kembali Republik Perspektif*. Jakarta: Kompas.
- Munandar, Haris. (2013, April 17). InMasi dan Kemiskinan. *Kompas*.
- Khudori. (2013, April 16). Pangan, In. asi, dan Kemiskinan. *Tempo*.
- Ganie-Rochman, Meuthia. (2011, Juni 21). Indikator Pembangunan yang Menggerakkan. *Kompas*.
- Ganie-Rochman, Meuthia. (2011, Januari 29). Disparitas Pendapatan. *Kompas*.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013, Maret 2). Mengurangi Ketimpangan. *Kompas*.
- Suradi, dkk. (2012). *Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan Studi Evaluasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin di Perkotaan*. Jakarta: P3KS Press.
- Nainggolan, Togieartua, dkk. (2012). *Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: P3KS Press.
- Juoro, Umar. (2013, Februari 19). Menjaga Keseimbangan Ekonomi. *Kompas*.
- Susilo, Wahyu. (2013, Maret 27). Mengakhiri Pembangunan Penghasil Ketimpangan. *Kompas*.
- Hatta. (2013, Februari 9). Ketimpangan Pendapatan: Makin Makmur tapi Makin Timpang (Bag I). *Warta Ekonomi*.